COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU SARA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PROVINSI SULAWESI UTARA

Rival Tatinggulu
NPP 33.0863
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: rivaltatinggulu2204@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Ella Lesmanawati Wargadinata, M.Si, M.A
Email: ellawarga@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The background of this research is based on the suboptimal utilization of tourism potential, limitations in facilities and infrastructure, and the lack of attention from the local government in supporting sustainable development. Therefore, collaboration among stakeholders is essential to ensure that tourism management operates effectively and provides benefits to the community.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the tourism development of Sara Island, Talaud Islands Regency, focusing on community interests and local economic strengthening.* ***Method:*** *This research employs a qualitative approach with a descriptive method to provide an in-depth description of the collaboration dynamics among the involved parties, including the Department of Tourism and Culture of Talaud Islands Regency, local village heads (Lurah), the private sector, tourism awareness groups (Pokdarwis), and the local community. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation.* ***Result:*** *The results indicate that the collaboration has been established through the mobilization of shared principles, mutual motivation, and collective action capacity, manifested in activities such as annual festivals, tourism promotion, and infrastructure development. The findings also demonstrate that the collaboration has yielded positive impacts, such as an increase in Regional Original Revenue (PAD) and community welfare. However, the implementation remains suboptimal due to various obstacles, including limited transportation accessibility, minimal infrastructure, and differing interests among actors.* ***Conclusion:*** *Consequently, the collaboration still requires strengthening in terms of trust, alignment of interests, collective capacity, as well as policy support and investment to ensure optimal and sustainable operations.*
Keywords: *Collaborative Governance, Tourism Development, Sara Island, Kepulauan Talaud Regency, Tourism and Culture Office of Kepulauan Talaud Regency.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Latar belakang penelitian ini didasarkan pada belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan secara berkelanjutan. Karena itu, diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berfokus pada kepentingan masyarakat dan penguatan ekonomi

lokal. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam dinamika kolaborasi antar pihak yang terlibat, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud, Lurah, pihak swasta, Pokdarwis, serta masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan melalui penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, serta kapasitas tindakan bersama, yang diwujudkan melalui kegiatan seperti festival tahunan, promosi wisata, serta pembangunan sarana prasarana. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi memberikan dampak positif berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan aksesibilitas transportasi, minimnya infrastruktur, serta perbedaan kepentingan antar aktor. **Kesimpulan:** Karena itu, Kolaborasi masih memerlukan penguatan dalam aspek kepercayaan, keselarasan kepentingan, kapasitas bersama, serta dukungan kebijakan dan investasi agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Kata kunci: Collaborative Governance, Pengembangan pariwisata, Pulau Sara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi besar di berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas rekreasi dan perjalanan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang dilaksanakan secara komprehensif, berkelanjutan, dan melibatkan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. UU Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa sektor pariwisata harus diselenggarakan berdasarkan prinsip partisipatif, bermanfaat, adil, dan berkelanjutan. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep collaborative governance yang menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Nurnawati, Sabaruddin, dan Nurrahman (2024), collaborative governance merupakan pendekatan yang mampu memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan melalui komunikasi, koordinasi, dan pembagian peran yang jelas untuk mencapai tujuan bersama.

Pengembangan pariwisata merupakan upaya yang terorganisir dan melibatkan berbagai pihak lintas sektor, seperti masyarakat, pelaku usaha perjalanan wisata, akomodasi, perhotelan, dan pemerintah (Djabbari, 2022). Sugiyah dalam Ni Luh Putu Ening Permini et al. (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan sangat ditentukan oleh model kolaborasi yang diterapkan, terutama keterlibatan pelaku pariwisata lokal dalam setiap proses pembangunan destinasi. Pariwisata berkelanjutan merupakan strategi pengembangan destinasi yang menyelaraskan kepentingan wisatawan, masyarakat lokal, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini mengedepankan keberlanjutan ekologi, sosial budaya, dan ekonomi untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang (Rochmatin et al., 2025). Namun demikian, sektor pariwisata menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan sebesar 74,84 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan sektor pariwisata memerlukan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif.

Pengembangan pariwisata mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan berkembangnya sektor ekonomi

lainnya (Aini & Putra, 2024). Selain itu, penguatan sinergi antar pihak menjadi faktor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata (Muallim et al., 2024). Dalam pengembangan pariwisata, peran stakeholder sangat menentukan keberhasilan pembangunan destinasi wisata. Stakeholder mencakup pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, media, dan organisasi masyarakat yang saling berkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Putri (2018) menjelaskan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam pengembangan destinasi wisata karena mampu menciptakan keselarasan program, mengurangi konflik kepentingan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada koordinasi, tetapi juga pada kepemimpinan yang mampu membangun kepercayaan dan komitmen bersama. Wargadinata (2016) menyatakan bahwa kepemimpinan kolaboratif berperan sebagai penghubung antar aktor yang berbeda kepentingan untuk menciptakan kesepahaman, memperkuat partisipasi, serta mendorong terciptanya solusi bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Hanafi (2022), keberhasilan collaborative governance dipengaruhi oleh aspek kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, kelembagaan, regulasi, pemetaan stakeholder, dan komunikasi yang efektif. Hal tersebut sejalan dengan Sitepu dan Maulana (2021) yang menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas pembangunan daerah melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya serta penyelesaian masalah publik secara bersama-sama.

Pariwisata memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan bahasa yang beragam (Mafaza & Setyowati, 2020). Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah terus mendorong pengembangan objek wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan pembangunan sektor pariwisata. Santoso (2023) menjelaskan bahwa pengembangan objek wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat identitas budaya daerah. Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata bahari yang besar, khususnya Pulau Sara. Dalam RIPPARDA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016, Pulau Sara ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas dengan visi menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai destinasi pariwisata nasional berbasis alam kelautan dan budaya yang berkelanjutan. Pengembangan destinasi ini mengedepankan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai implementasi collaborative governance. Pulau Sara memiliki potensi berupa pantai pasir putih, keindahan laut, dan posisi strategis di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina (Andalangi, 2018). Festival Pulau Sara tahun 2017 berhasil menarik sekitar 5.000 wisatawan lokal maupun mancanegara dan menjadi bagian dari upaya promosi pariwisata daerah. Namun, meskipun telah menjadi destinasi prioritas, pengembangan Pulau Sara masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses transportasi laut, minimnya sarana dan prasarana wisata, belum optimalnya koordinasi antar stakeholder, serta belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur terhadap implementasi RIPPARDA.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, penguatan collaborative governance melalui peningkatan koordinasi, kepemimpinan kolaboratif, partisipasi masyarakat, keterlibatan sektor swasta, serta penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan pengembangan pariwisata Pulau Sara yang efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pengembangan pariwisata Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud meskipun destinasi tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu objek wisata prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016. Secara normatif, pemerintah daerah telah menetapkan visi untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai destinasi pariwisata berbasis kelautan dan budaya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi empiris menunjukkan masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan akses transportasi menuju Pulau Sara, minimnya sarana dan prasarana pendukung wisata, belum optimalnya keterlibatan sektor swasta, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata. Selain itu, meskipun Pulau Sara memiliki potensi wisata bahari yang besar dan menjadi salah satu ikon wisata daerah, jumlah kunjungan wisatawan masih mengalami fluktuasi dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan pembangunan pariwisata yang telah ditetapkan pemerintah dengan implementasi pengelolaan pariwisata di lapangan.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas collaborative governance, public private partnership, koordinasi stakeholder, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di berbagai daerah, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan Collaborative Governance dalam pengembangan destinasi wisata pulau kecil di wilayah perbatasan negara, khususnya Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pola kemitraan pemerintah dan swasta, peran stakeholder, atau pengelolaan desa wisata, sedangkan kajian yang menganalisis secara komprehensif dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan sektor swasta dengan menggunakan perspektif Collaborative Governance Regime dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, serta dampak dan adaptasi kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara sebagai destinasi wisata unggulan di daerah perbatasan Indonesia.

1.3. Urgensi Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud, penelitian ini penting dilakukan karena Pulau Sara telah ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas dalam RIPPARDA Kabupaten Kepulauan Talaud, namun pengembangannya masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan aksesibilitas transportasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung, belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum adanya mekanisme evaluasi yang sistematis terhadap pelaksanaan program pengembangan pariwisata. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemanfaatan potensi wisata Pulau Sara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian ini, dapat diperoleh gambaran empiris mengenai bagaimana kolaborasi antara

pemerintah daerah, masyarakat, kelompok sadar wisata, dan sektor swasta dilaksanakan dalam pengembangan pariwisata, sehingga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan akan mengalami keterbatasan informasi dalam memahami faktor pendukung maupun penghambat kolaborasi yang terjadi, sehingga upaya pengembangan Pulau Sara berisiko berjalan tidak optimal, kurang terintegrasi, dan sulit mencapai target pembangunan pariwisata yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta pola kerja sama yang dibangun dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan Jamal dan Getz (1995) yang menjelaskan bahwa perencanaan pariwisata berbasis komunitas memerlukan proses kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk menyatukan berbagai kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan destinasi secara berkelanjutan. Selain itu, Bramwell dan Sharman (1999) menegaskan bahwa keterlibatan berbagai aktor dalam proses perumusan kebijakan pariwisata lokal menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata.

Djabbari (2022) meneliti Public Private Partnership di Sektor Pariwisata Kabupaten Toraja Utara: Model Life Cycle Contract dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori Public Private Partnership dari Matraeva et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Life Cycle Contract mampu memperkuat kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan tersebut memperkuat pandangan Dredge (2006) yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata pada tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dari jaringan kebijakan (policy networks) yang menghubungkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam suatu sistem tata kelola yang saling bergantung.

Permini, Junaedy, dan Purnamasari (2024) mengkaji model kolaborasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseptual eksploratif partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antarkomponen masyarakat mampu mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Sejalan dengan hasil tersebut, Volgger dan Pechlaner (2014) menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola destinasi wisata sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi pengelola destinasi dalam membangun koordinasi, kepemimpinan, dan kerja sama yang efektif antaraktor yang terlibat.

Rochmatin, Muchsin, dan Sunariyanto (2025) meneliti Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Kertosari menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi peran para stakeholder melalui pendekatan kolaboratif menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pariwisata serta mengatasi berbagai hambatan pengelolaan destinasi wisata. Temuan ini juga didukung oleh Fyall, Garrod, dan Wang (2012) yang menjelaskan bahwa kolaborasi destinasi merupakan fenomena multidimensional yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, pembagian sumber daya, serta komitmen bersama untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan destinasi wisata.

Aini, Putra, dan Harmawan (2024) melakukan penelitian mengenai peran stakeholder dalam pengembangan daya tarik wisata Kampung Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan Collaborative Government, penelitian tersebut menemukan bahwa pengembangan wisata melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pokdarwis dan Dinas Pariwisata, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia, regulasi, dan koordinasi antarpihak. Muallim, Juharni, dan Suaib (2024) mengkaji Collaborative Governance Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sinjai menggunakan teori Ansell dan Gash (2008). Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan PAD.

Nuwita, Sulistiowati, dan Meliyana (2021) meneliti koordinasi antar stakeholder dalam pengembangan ekowisata Desa Sungai Langkah, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dengan metode deskriptif kualitatif dan teori koordinasi dari Ndraha, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, pelatihan sumber daya manusia, serta kesepakatan bersama menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan pariwisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Hanafi (2022) dalam penelitiannya mengenai pengembangan pariwisata melalui Collaborative Governance di Kabupaten Magelang menemukan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh adanya kepercayaan, komitmen bersama, kepemimpinan yang kuat, serta dukungan kelembagaan yang memadai.

Siswanto dan Senaen (2024) meneliti Collaborative Governance dalam Pengembangan Wisata Romokalisari Adventure Land Surabaya melalui studi literatur menggunakan teori Ratner (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Sementara itu, Djabbari, Alwi, dan Suryadi (2021) meneliti model Public Private Partnership dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara dan menemukan bahwa kerja sama pemerintah dan sektor swasta mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata serta kesejahteraan masyarakat.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) yang kuat dari aspek objek, konteks, kerangka teori, dan kebijakan, yang dapat dibuktikan secara empiris dan teoritis melalui perbandingan dengan lima penelitian terdahulu. Dari aspek karakteristik objek, jika penelitian Djoko Siswanto M., dkk. (2024) menyoroti tata kelola kolaboratif di kawasan wisata perkotaan yang telah berkembang pesat, penelitian ini secara khusus berfokus pada Pulau Sara yang merupakan pulau perbatasan tak berpenghuni dengan berbagai kendala mendasar seperti aksesibilitas dan infrastruktur. Selanjutnya, dari segi pendekatan tata kelola, penelitian Muhammad Hidayat Djabbari (2022) menggunakan model *Public Private Partnership* (PPP) yang berorientasi pada investasi antara pemerintah dan swasta, sedangkan penelitian ini memetakan interaksi multi-aktor yang lebih inklusif dengan membedah peran pemerintah daerah, masyarakat lokal melalui Pokdarwis, dan pihak swasta secara bersamaan.

Kebaruan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pengembangan pariwisata Pulau Sara melalui pendekatan *collaborative governance* telah melibatkan berbagai aktor, yaitu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis, serta pihak swasta. Kolaborasi yang terbangun belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas menuju lokasi wisata, keterbatasan anggaran, serta belum maksimalnya koordinasi

antarpemangku kepentingan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor yang terlibat, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan komitmen yang dibangun dalam proses kolaborasi.

Temuan penelitian ini sama halnya dengan temuan penelitian Djoko Siswanto M., dkk. (2024) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh sinergi dan koordinasi antaraktor yang terlibat dalam tata kelola pariwisata. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi pada Pulau Sara menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena karakteristik wilayahnya sebagai kawasan perbatasan dan pulau kecil yang belum memiliki infrastruktur memadai. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Djoko Siswanto M., dkk. (2024) bahwa kolaborasi merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik wilayah yang menjadi objek penelitian (Siswanto dkk., 2024).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan Pulau Sara masih terbatas pada dukungan tertentu dan belum berkembang menjadi kerja sama investasi yang berkelanjutan. Temuan ini berbeda dengan penelitian Muhammad Hidayat Djabbari (2022) yang menemukan bahwa pola Public Private Partnership (PPP) mampu mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui keterlibatan aktif investor dan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas maupun pendanaan. Perbedaan tersebut terjadi karena objek penelitian memiliki karakteristik yang berbeda. Pada penelitian Muhammad Hidayat Djabbari (2022), lokasi penelitian memiliki daya tarik investasi yang lebih tinggi, sedangkan Pulau Sara masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menyebabkan minat investasi swasta belum berkembang secara optimal. Karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan swasta dalam collaborative governance tidak selalu dapat diwujudkan secara maksimal apabila kondisi pendukung investasi belum tersedia (Djabbari, 2022).

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan Pulau Sara ditandai oleh adanya dialog dan komunikasi antaraktor yang dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, dan kegiatan bersama. Akan tetapi, komunikasi tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengembangan wisata. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Laily Rochmatin, dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa dialog tatap muka dan komunikasi menjadi unsur penting dalam keberhasilan collaborative governance. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi saja tidak cukup untuk menghasilkan kolaborasi yang efektif apabila tidak diikuti dengan dukungan sumber daya, komitmen bersama, dan tindakan kolaboratif yang berkelanjutan. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat penelitian Laily Rochmatin, dkk. (2025) sekaligus menunjukkan pentingnya faktor-faktor lain di luar proses dialog dalam mewujudkan keberhasilan kolaborasi (Rochmatin dkk., 2025).

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), penelitian ini menemukan bahwa dinamika kolaborasi pada pengembangan Pulau Sara telah menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya pengembangan pariwisata daerah. Akan tetapi, implementasi tindakan kolaboratif masih menghadapi berbagai kendala sehingga dampak yang dihasilkan belum optimal. Temuan ini berbeda dengan penelitian Ni Luh Putu Ening Permini, dkk. (2024) yang lebih menitikberatkan pada perumusan model kolaborasi partisipatif sebagai solusi konseptual pengembangan pariwisata. Jika penelitian tersebut berfokus pada desain model kolaborasi, penelitian ini menunjukkan kondisi nyata pelaksanaan kolaborasi di lapangan yang masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai tantangan implementasi collaborative governance yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya (Permini dkk., 2024).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa implementasi RIPPARDA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 belum sepenuhnya mampu mendorong pengembangan Pulau Sara sebagaimana

yang direncanakan. Meskipun Pulau Sara telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi unggulan daerah, berbagai program pengembangan masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Temuan ini berbeda dengan penelitian Ahmad Hamdan Muallim, dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah apabila didukung oleh pelaksanaan yang efektif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan realitas implementasi di lapangan. Dengan demikian, hasil dari temuan ini memperluas hasil penelitian Ahmad Hamdan Muallim, dkk. (2024) dengan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga oleh kemampuan para aktor untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara kolaboratif dan berkelanjutan (Muallim dkk., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance merupakan pendekatan yang relevan dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara. Temuan penelitian ini memperkuat sebagian hasil penelitian terdahulu mengenai pentingnya kolaborasi antaraktor dalam pengembangan pariwisata, namun juga menemukan beberapa perbedaan yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah perbatasan, keterbatasan infrastruktur, rendahnya investasi swasta, serta belum optimalnya implementasi kebijakan daerah. Sebab itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian collaborative governance, khususnya pada konteks pengembangan destinasi wisata di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan logika berpikir induktif untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dinamika kolaborasi antaraktor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan destinasi wisata, serta memahami makna di balik fenomena yang terjadi secara alamiah di lapangan (Sugiyono, 2011; Muhajirin et al., 2024). Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling karena informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara (Sugiyono, 2023). Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan dan koordinasi pengembangan pariwisata, Kepala Bidang Pariwisata, Lurah Lirung, pengelola wisata Pulau Sara, tokoh nelayan, tokoh adat/masyarakat, serta Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kombinasi informan tersebut dipilih agar diperoleh perspektif yang utuh dari sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pelaksana teknis, pengelola wisata, dan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari pengembangan pariwisata.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Sugiyono, 2023). Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan bantuan perangkat

lunak NVivo 12 Pro melalui tahapan familiarisasi data, pembentukan kode awal, konstruksi tema, pemeriksaan kembali tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penyusunan laporan penelitian (Braun & Clarke, 2006). Analisis tersebut diarahkan pada dimensi Collaborative Governance menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), yaitu dinamika kolaborasi, tindakan dalam kolaborasi, serta dampak dan adaptasi proses kolaborasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Lirung, Kecamatan Lirung, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan penelitian dan pengumpulan data berlangsung pada Tahun Akademik 2025/2026, terutama pada tahap penelitian lapangan yang dilaksanakan sekitar bulan Februari sampai April 2026, mencakup observasi, wawancara, dokumentasi, serta pengolahan data hingga penyusunan skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud, peneliti mengamati adanya kolaborasi antarpihak dalam pengembangan sektor pariwisata. Sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal melalui peluang usaha seperti perdagangan, jasa transportasi, dan penyediaan kebutuhan wisatawan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena sarana dan prasarana yang tersedia belum dikelola secara baik dan berkelanjutan. Selain itu, masih kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata secara menyeluruh terlihat dari belum maksimalnya pembinaan, pengawasan, dan penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan. Akibatnya, pengembangan pariwisata berjalan lambat dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan sarana dan prasarana serta penguatan kebijakan yang lebih terarah. Berdasarkan permasalahan tersebut, hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Penerapan Konsep Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara

Analisis data menggunakan NVIVO 12 Pro diawali dengan proses import data, yaitu mengunggah seluruh data hasil penelitian berupa dokumentasi dan wawancara. Data kemudian dikategorikan sesuai kelompoknya dengan membuat folder berdasarkan jenis data yang diperoleh.

Gambar 1.
Sumber Data yang Telah Di-Import pada NVIVO 12 Pro

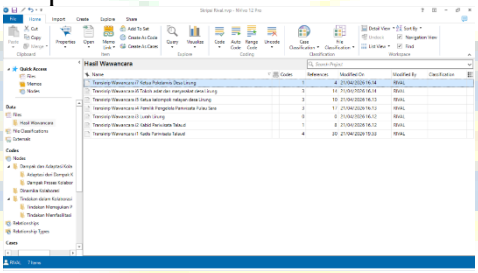

Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan NVIVO 12 Pro, 2026

Berdasarkan Gambar 1. terdapat 7 folder yang berisi hasil wawancara dari 7 informan. Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam folder sesuai jenis data. Setelah proses import data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan pengkodean (coding) terhadap data yang telah diunggah. Proses pengkodean dilakukan dengan mengkategorikan codes sesuai kondisi di lapangan untuk memperdalam pemahaman terhadap masalah penelitian berdasarkan pola-pola yang ditemukan.

Gambar 2.
Olahan Codes pada NVIVO 12 Pro

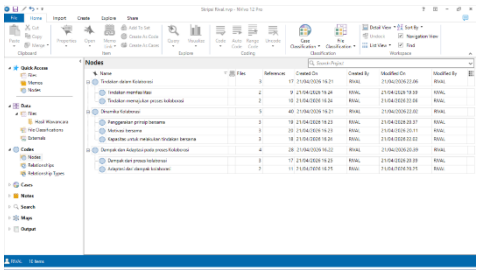

Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan NVIVO 12 Pro, 2026

Berdasarkan Gambar 2. codes telah terbagi ke dalam beberapa faktor yang diperoleh dari hasil penelitian.

Tabel 1.

Parent Codes dan Child Codes

Parent Codes	***Child Codes***
1. Dinamika Kolaborasi	1. Penggerakan Prinsip bersama 2. Motivasi bersama 3. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama
2. Tindakan dalam Kolaborasi	1. Tindakan memfasilitasi 2. Tindakan memajukan proses kolaborasi
3. Dampak dan Adaptasi pada proses Kolaborasi	1. Dampak dari proses kolaborasi 2. Adaptasi dari dampak kolaborasi

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 1. data yang telah di-import dikelompokkan ke dalam kategori parent codes dan child codes. Selanjutnya dilakukan proses pengkodean yang kemudian divisualisasikan menggunakan fitur Hierarchy Chart pada NVIVO 12 Pro untuk melihat dominasi tema dalam data penelitian.

Gambar 3.

Diagram Hierarchy Chart Analisis Data

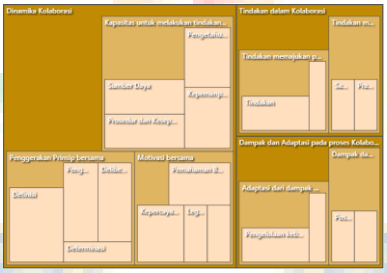

Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan NVIVO 12 Pro, 2026

Berdasarkan Gambar 3. terdapat tiga dimensi utama yang mendukung penerapan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Dinamika Kolaborasi, Tindakan dalam Kolaborasi, serta Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi. Node yang lebih besar menunjukkan tema yang lebih sering muncul dalam wawancara.

3.1.1 Dinamika Kolaborasi

Gambar 4.

Diagram Hierarchy Chart Dinamika Kolaborasi

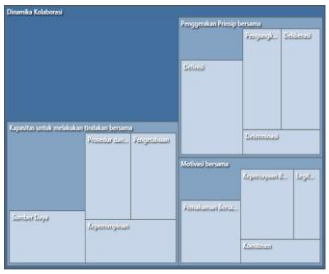

Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan NVIVO 12 Pro, 2026

Berdasarkan Gambar 4. dimensi Dinamika Kolaborasi terdiri dari tiga indikator utama, yaitu Penggerakan Prinsip Bersama, Motivasi Bersama, dan Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama. Ketiga aspek ini menjadi fokus utama dalam penerapan collaborative governance. Dinamika kolaborasi melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud, pemerintah kelurahan/desa, Pokdarwis, masyarakat lokal, dan pihak swasta. Kolaborasi diwujudkan melalui rapat koordinasi, komunikasi lapangan, penyelenggaraan festival tahunan, promosi wisata, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan aksesibilitas, sumber daya, dan koordinasi yang belum optimal.

1. Penggerakan Prinsip Bersama

Pihak-pihak yang terlibat berupaya membangun visi bersama melalui pertemuan rutin dan diskusi langsung untuk menentukan langkah strategis. Kolaborasi mencakup perencanaan terpadu, pembagian tugas yang adil, serta keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan. Kepercayaan dibangun melalui kejujuran informasi dan kepatuhan terhadap kesepakatan bersama. Meskipun tujuan telah ditetapkan, perbedaan kepentingan dan tingkat pemahaman masih menjadi tantangan.

Gambar 5.

Word Cloud pada Node Penggerakan Prinsip Bersama



Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan NVIVO 12 Pro, 2026

Berdasarkan Gambar 5. kata "kepercayaan" menjadi kata yang paling dominan muncul dengan persentase 3,52%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam kolaborasi pengembangan pariwisata Pulau Sara. Kata lain yang dominan adalah "membangun", "melibatkan", dan "pertemuan". Kata membangun menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan proses yang berkelanjutan. Kata melibatkan mencerminkan pentingnya partisipasi semua pihak, sedangkan kata pertemuan menunjukkan adanya forum komunikasi untuk menyatukan persepsi dan menyelesaikan perbedaan kepentingan.

2. Motivasi Bersama

Motivasi bersama terbentuk dari perpaduan tujuan yang saling melengkapi. Pemerintah daerah berfokus pada peningkatan kinerja sektor dan PAD, sedangkan masyarakat dan Pokdarwis berfokus pada manfaat ekonomi langsung. Keterlibatan masyarakat dalam jasa wisata dan program pemerintah menunjukkan adanya sinkronisasi motivasi antaraktor. Motivasi bersama juga muncul dari kesadaran bahwa pariwisata merupakan sektor strategis yang dapat menjadi sumber penghidupan baru, meningkatkan citra daerah, dan memanfaatkan potensi wisata secara optimal.

Gambar 6.
Word Cloud pada Node Motivasi Bersama



Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan NVIVO 12 Pro, 2026

Berdasarkan Gambar 6. kata "kepentingan" menjadi kata yang paling dominan muncul dengan persentase 3,41%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktor membawa tujuan dan harapan masing-masing dalam pengembangan pariwisata. Kata lain yang dominan yaitu "menumbuhkan" (3,46%), "diperlukan" (2,93%), dan "kesejahteraan" (2,75%). Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa motivasi bersama dibangun melalui proses interaksi yang berkelanjutan dan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, motivasi bersama terbentuk dari kesamaan arah kepentingan, kesadaran kolektif, dan harapan akan manfaat yang dirasakan bersama.

3. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas kolaborasi terlihat dari kemampuan masing-masing aktor dalam mendukung pelaksanaan program. Pemerintah daerah memiliki kapasitas berupa kewenangan, kebijakan, dan anggaran, sedangkan masyarakat dan Pokdarwis memiliki kapasitas berupa tenaga kerja, pengetahuan lokal, dan keterampilan layanan wisata. Namun, kapasitas tersebut masih terbatas, terutama dalam manajemen, pemanfaatan fasilitas, dan pengembangan produk wisata. Meskipun demikian, kolaborasi tetap memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan dan peluang ekonomi masyarakat.

Gambar 7.
Word Cloud pada Node Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama



Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan NVIVO 12 Pro, 2026

Berdasarkan Gambar 7. kata "kapasitas" menjadi kata yang paling dominan dengan persentase 3,30%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan para pihak untuk bekerja bersama merupakan faktor utama keberhasilan kolaborasi. Kata lain yang cukup dominan yaitu "mekanisme" dan "pembagian". Kata mekanisme menunjukkan pentingnya sistem kerja yang jelas dalam koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, kata pembagian menunjukkan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing pihak. Dengan demikian, keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara sangat bergantung pada kapasitas para pihak yang didukung oleh mekanisme kerja yang jelas, pembagian peran yang tepat, kesiapan sumber daya, sistem koordinasi, dan kejelasan tanggung jawab sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3.1.2 Tindakan dalam Kolaborasi

Dimensi tindakan dalam kolaborasi menjelaskan dua indikator yang mendukung penerapan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara, yaitu tindakan memfasilitasi dan tindakan memajukan proses kolaborasi.

Gambar 8.

Diagram Hierarchy Chart Tindakan dalam Kolaborasi

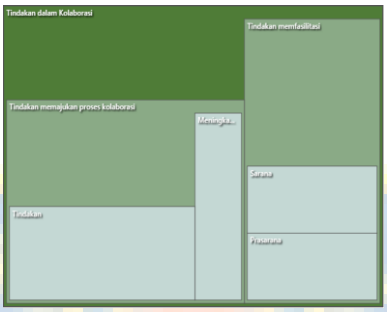

Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan NVIVO 12 Pro, 2026

Berdasarkan Gambar 8. dimensi tindakan dalam kolaborasi terdiri dari beberapa node dengan proporsi yang berbeda. Node yang paling dominan adalah tindakan memajukan proses kolaborasi, sedangkan node yang lebih kecil adalah tindakan memfasilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan dalam kolaborasi sangat penting untuk memajukan proses kolaborasi yang didukung oleh tindakan memfasilitasi. Selain menunjukkan dominasi tema, diagram ini juga menggambarkan bahwa penerapan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara berfokus pada bagaimana tindakan antarpihak dilakukan untuk memajukan proses kolaborasi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan potensi wisata.

1. Tindakan Memfasilitasi

Tindakan memfasilitasi sangat penting dalam penerapan kolaborasi antarpihak dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara karena mendukung kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperkuat daya tarik wisata di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Gambar 9.

Word Cloud pada Node Tindakan Memfasilitasi



Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan NVIVO 12 Pro, 2026

Berdasarkan Gambar 9. kata "fasilitasi" menjadi kata yang paling dominan dengan persentase 4,25%, diikuti kata "mendukung" sebesar 3,97%. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan memfasilitasi berfokus pada berbagai tindakan yang dilakukan antarpihak untuk mendukung kerja sama dan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara agar dapat berjalan sesuai tujuan bersama. Kata "mendukung" menunjukkan pentingnya dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya untuk memperkuat kerja sama dalam mengembangkan potensi wisata secara maksimal sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tindakan Memajukan Proses Kolaborasi

Selain tindakan memfasilitasi, dimensi tindakan dalam kolaborasi juga mencakup indikator tindakan memajukan proses kolaborasi yang berperan dalam mendorong keberlanjutan kerja sama antarpihak.

Gambar 10.
Word Cloud pada Node Tindakan Memajukan Proses Kolaborasi


tindakan
meningkatkan
mendukung
memiliki
bersifat
keberlanjutan
prasarana
pengelolaan
strategi
pertemuan
kegiatan
kapasitas
memfasilitasi
kebutuhan
berjalan
pelatihan
keterlibatan
pendampingan
pembagian
kelompok
sementara
perizinan
sehingga
langsung
dukungan
tanggung
berbagai
membangun
memaksimalkan
kualitas
lingkungan
penyediaan
infrastruktur
memperluas
pembinaan
kerjasama
kemampuan
berkembang
mendorong
menyertai
permasalahan
kepentingan
kejelasan
pemahaman
pengawasan
pembangunan
bertumpu
terhadap
menyediakan
pelaksanaan
kelebihan
pengembangan
pemberdayaan
pengelolaan
pengawasan
pengaturan
pelayanan
pengelolaan
pengembangan
pemberday

kesejahteraan melalui terbukanya peluang usaha dan bertambahnya pendapatan, serta memperkuat hubungan sosial dan kepercayaan antaraktor yang terlibat.

Gambar 12.

Word Cloud pada Node Dampak Proses Kolaborasi



Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan NVIVO 12 Pro, 2026

Berdasarkan Gambar 12. kata "proses" menjadi kata yang paling dominan dengan persentase 3,52%, diikuti kata "wisata" sebesar 3,11%, dan "tindakan" sebesar 3,09%. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa dampak proses kolaborasi menjelaskan bagaimana proses pengembangan wisata Pulau Sara yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan dapat memberikan dampak kepada masyarakat. Dampak tersebut berupa peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah melalui pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak swasta, maupun pihak lainnya. Dengan adanya dampak proses kolaborasi, penerapan collaborative governance dapat menjadi acuan dalam meningkatkan potensi wisata Pulau Sara melalui kerja sama antarpihak.

2. Adaptasi dari Dampak Kolaborasi

Adaptasi dari dampak kolaborasi merupakan proses penyesuaian yang dilakukan para pihak sebagai respons terhadap hasil kerja sama dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara. Adaptasi muncul dari berbagai dampak yang dirasakan, baik positif seperti peningkatan pendapatan dan keterlibatan masyarakat, maupun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan tekanan lingkungan. Melalui proses ini, para aktor berupaya memperbaiki pola kerja, meningkatkan koordinasi, dan menyesuaikan strategi agar pengelolaan pariwisata tetap berjalan dan berkembang sesuai kondisi yang ada.

Gambar 13.

Word Cloud pada Node Adaptasi dari Dampak Kolaborasi



Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan NVIVO 12 Pro, 2026

Berdasarkan Gambar 13. kata "meningkatkan" memiliki frekuensi kemunculan tertinggi dengan persentase 3,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi lebih banyak direpresentasikan melalui aktivitas konkret yang dilaksanakan secara langsung dengan meningkatkan berbagai sumber daya untuk menunjang pengembangan pariwisata, bukan hanya dalam bentuk kebijakan atau perencanaan. Kata lain yang dominan seperti "pengelolaan", "keberlanjutan", dan "tindakan" menunjukkan bahwa adaptasi dari dampak kolaborasi memerlukan tindakan nyata dari setiap pihak dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga dan memelihara sarana serta prasarana yang tersedia agar tetap berfungsi dengan baik. Dengan demikian, pengembangan pariwisata

Pulau Sara dapat berlangsung lebih lama dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi wisata yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sub bab ini secara khusus menguraikan analisis komparatif antara hasil temuan empiris penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan berbagai temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Perbandingan ini penting untuk mendudukkan posisi penelitian ini di antara literatur yang sudah ada, guna melihat sejauh mana temuan di lapangan saling mendukung, memperkuat, atau justru menolak temuan sebelumnya akibat adanya perbedaan karakteristik dan konteks wilayah.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* di Pulau Sara telah berjalan melalui tiga dimensi utama (Emerson dkk., 2012), yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, serta adaptasi dari dampak kolaborasi. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena membuktikan bahwa pelibatan aktif antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemerintah kelurahan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pihak swasta, dan masyarakat mampu menggerakkan prinsip dan motivasi bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian Muallim, Juharni, dan Suaib (2024) yang menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program serta peraturan daerah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan bersama dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Pulau Sara, sinergi ini terwujud secara konkret melalui kegiatan promosi wisata, penyelenggaraan festival daerah tahunan, dan gotong royong pemeliharaan sarana prasarana yang secara langsung memberikan dampak pada peningkatan geliat ekonomi masyarakat pesisir.

Terkait dengan elemen komunikasi dan kesadaran antar pemangku kepentingan, sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan awal dari suatu kolaborasi sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi dan komitmen para aktor. Temuan di Pulau Sara memperlihatkan bahwa rasa saling percaya (*trust*) menjadi fondasi awal bergeraknya kolaborasi lokal. Temuan ini mendukung kesimpulan dari penelitian Rochmatin, dkk. (2025) dan Permini, dkk. (2024) yang sama-sama menyatakan bahwa penciptaan sinergi yang kuat, komunikasi yang intensif, serta komitmen bersama antar seluruh komponen masyarakat desa adalah kunci untuk mengatasi kebuntuan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Namun demikian, proses kolaborasi yang ideal tidak selalu berjalan tanpa hambatan di lapangan. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya dari Aini, Putra, dan Harmawan (2024) bahwa pengembangan daya tarik wisata pada tingkat lokal sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia (kapasitas), dan belum optimalnya koordinasi, penelitian ini juga menemukan fenomena serupa di Pulau Sara. Terbatasnya aksesibilitas transportasi ke pulau yang tidak berpenghuni tersebut, minimnya infrastruktur pendukung yang memadai, serta ketergantungan sumber daya pada inisiatif beberapa aktor saja menjadi tantangan berat yang menghambat optimalisasi tindakan kolaboratif antarpihak.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan fakta-fakta lapangan yang kontras dengan literatur yang sudah mapan. Berbeda dengan temuan penelitian Hanafi (2022) bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat ditopang oleh kelembagaan dan regulasi tata ruang/birokrasi yang kuat, temuan di Pulau Sara menunjukkan hal yang sebaliknya. Di Kabupaten Kepulauan Talaud, kelembagaan kolaboratif khusus yang mengelola Pulau Sara belum terbentuk secara permanen dan formal. Koordinasi yang terjadi masih sangat bergantung pada inisiatif dan komitmen personal masing-masing aktor (seperti Lurah atau Ketua Pokdarwis), alih-alih diikat oleh struktur kelembagaan yang baku. Hal ini mengindikasikan bahwa pada kawasan perbatasan yang sedang berkembang, kelenturan (*flexibility*) dan adaptasi dari dampak kolaborasi seringkali mendahului pembentukan regulasi formal.

Lebih lanjut, temuan ini menolak penelitian sebelumnya karena perbedaan karakteristik objek penelitian. Jika merujuk pada temuan penelitian Djabbari (2022) di Toraja Utara atau Djoko Siswanto dkk. (2024) di *Romokalisari Adventure Land* Surabaya yang menyimpulkan bahwa pengembangan wisata paling efektif dilakukan dengan pendekatan *Public Private Partnership* (kemitraan murni pemerintah-swasta skala besar berorientasi profit), temuan di Pulau Sara tidak dapat mengadopsi kesimpulan tersebut. Karakteristik Pulau Sara sebagai kawasan bahari perbatasan terluar Indonesia (*remote area*) membuatnya belum sepenuhnya siap untuk mekanisme komersialisasi swasta berskala besar. Oleh karena itu, kolaborasi yang terbentuk di Pulau Sara lebih menitikberatkan pada pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat lokal dan penguatan kapasitas Pokdarwis, bukan sekadar relasi transaksional bipolar antara pemerintah dan investor swasta.

Berdasarkan keseluruhan komparasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* di sektor pariwisata tidak memiliki cetak biru (*blueprint*) tunggal. Meskipun konsep dasar mengenai pentingnya komunikasi, sinergi, dan partisipasi terbukti sama dengan temuan-temuan terdahulu, hambatan geografis kepulauan dan belum matangnya desain kelembagaan lokal menjadikan adaptasi kolaborasi di Pulau Sara memiliki keunikan tersendiri.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata Pulau Sara tidak hanya ditentukan oleh proses kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama meliputi tingginya potensi alam Pulau Sara sebagai destinasi wisata bahari, adanya dukungan regulasi dan kebijakan daerah, komitmen antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan pariwisata secara bersama, serta antusiasme masyarakat dalam mendukung kegiatan kepariwisataan. Di sisi lain, faktor penghambat yang masih dihadapi antara lain keterbatasan aksesibilitas dan sarana prasarana pendukung wisata, kurang optimalnya perhatian dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam pengelolaan wisata, serta koordinasi dan sinkronisasi program antar pihak yang belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi, peningkatan infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat secara aktif menjadi aspek penting untuk mewujudkan pengembangan pariwisata Pulau Sara yang berkelanjutan

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud telah berjalan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan kelompok sadar wisata, yang ditunjukkan melalui penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, serta kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dalam mendukung pengembangan pariwisata. Kolaborasi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi kendala berupa keterbatasan aksesibilitas, sumber daya, dan kelembagaan, sehingga diperlukan penguatan tata kelola kolaboratif agar pengembangan pariwisata Pulau Sara dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi studi, yaitu Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada destinasi wisata lainnya. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif yang bergantung pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga temuan penelitian dipengaruhi oleh kondisi dan persepsi informan pada saat penelitian berlangsung.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada destinasi wisata lain di wilayah kepulauan atau daerah perbatasan untuk memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif mengenai penerapan collaborative governance. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas forum kolaborasi, penguatan kelembagaan, pengembangan infrastruktur, serta dampaknya terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, PAD, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud, pemerintah setempat, para informan penelitian, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kesempatan sehingga penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aini, N., & Putra, T. (2024). Kajian Kualitatif Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Kampung Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Kajian Pariwisata Dan Bisnis Perhotelan, 5(1), 28–34. https://doi.org/10.24036/jkpbp.v5i1.58572

Andalangi, V. (2018). WISATA PANTAI PULAU SARA DI TALAUD. Arsitektur: Lansekap Sequence. Jurnal Arsitektur DASENG, 14–23. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/daseng/article/view/19022

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bramwell, B., & Sharman, A. (1999). Collaboration in local tourism policymaking. Annals of Tourism Research, 26(2), 392–415. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00105-4

Djabbari, M. H. (2022). Public Private Partnership Di Sektor Pariwisata Kabupaten Toraja Utara: Model Life Cycle Contract Public Private Partnership in The Tourism Sector of Toraja Utara District: Life Cycle Contract Model. Pesona Pariwisata, 1(2)(2), 76–88. https://peta.upnjatim.ac.id/index.php/peta/article/view/46/25

Dredge, D. (2006). Policy networks and the local organisation of tourism. Tourism Management, 27(2), 269–280. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.10.003

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Fyall, A., Garrod, B., & Wang, Y. (2012). Destination collaboration: A critical review of theoretical approaches to a multi-dimensional phenomenon. Journal of Destination Marketing & Management, 1(1–2), 10–26. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2012.10.002

Hanafi, M. (2022). Pengembangan Pariwisata Melalui Collaborative Governance Di Kabupaten Magelang. Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi, 19(1), 1–17. https://doi.org/10.21831/efisiensi.v19i1.53447

Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. Annals of Tourism Research, 22(1), 186–204. https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00067-3

Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Kebijakan Publik, 11(1), 7. https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12

Muallim, A. H., Juharni, J., & Suaib, Muh. R. (2024). Colaborative Governance Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Paradigma Journal of Administration, 2(2), 83–88. https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5159

Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif Tahapan Penelitian. Journal Genta Mulia, 15(1), 82–92. https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/903

Ni Luh Putu Ening Permini, I Kadek Dede Junaedy, & Ni Kadek Ayu Dewi Purnamasari. (2024). Model Kolaborasi Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Selumbung Kecamatan Manggis Karangasem. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 10(4), 819–827. https://doi.org/10.25157/moderat.v10i4.4055

Nurnawati, E., Sabaruddin, & Nurrahman, A. (2024). Analisis collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Jurnal Media Birokrasi, 6(2). https://doi.org/10.33701/jmb.v6i2.4832

Nuwita, M. S. (2021). Koordinasi Antar Stakholder dalam Pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langkah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 3(3), 267–280. https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.99

Putri, A. R. S. (2018). Koordinasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan strategi pengembangan Destination Management Organization (DMO) di Pangandaran. Jurnal Manajemen Pemerintahan. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/445

Rochmatin, L., Muchsin, S., Magister, P., Administrasi, I., Malang, U. I., Timur, J., Prodi, D., Ilmu, M., Malang, U. I., Timur, J., Prodi, D., Ilmu, M., Malang, U. I., & Timur, J. (2025). Colllaborative Governance Dalam Tata Kelola. 16(2), 74–89 https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i02.16741

Santoso, E. B. (2023). Pengembangan objek wisata Nagari Tuo Pariangan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Wahana Bhakti Praja. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/3763

Sitepu, P. A. B., & Maulana, R. Y. (2021). Tata kelola program corporate social responsibility (CSR) melalui konsep collaborative governance dalam menunjang program pembangunan daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1), 80–90. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438

Sugiyono. 2023. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi Kedua). Alfabeta.

_____. 2011. Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Volgger, M., & Pechlaner, H. (2014). Requirements for destination management organizations in destination governance: Understanding DMO success. Tourism Management, 41, 64–75. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.09.001

Wargadinata, E. L. (2016). Kepemimpinan kolaboratif. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/73